



MANAJEMEN SDM
DALAM HUBUNGAN
SIPIL MILITER
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Dr. Herlina Juni Risma Saragih, M.Si., CIQnR., CIQaR.

MANAJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN SIPIL MILITER UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Dr. Herlina Juni Risma Saragih, M.Si., CIQnR., CIQaR.



**MANAJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN SIPIL MILITER
UNTUK PERTAHANAN NEGARA**

Penulis:

Dr. Herlina Juni Risma Saragih, M.Si., CIQnR., CIQaR.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.pinterest.com

Tata Letak:

Dr. Eko G. Samudro, S.Pd., M.Han.

Editor:

Dr. Eko G. Samudro, S.Pd., M.Han.

Rizki Putri, S.E., M.Han.

ISBN:

978-623-500-297-2

978-623-500-298-9 (PDF)

Cetakan Pertama:

Juli, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis bisa menuliskan buku ini secara komprehensif. Buku ini disusun untuk memberikan kontribusi dan khazanah keilmuan untuk pemerintah, lembaga pertahanan dan keamanan, sektoral swasta dan masyarakat secara masif. Dimana hubungan sipil militer yang lebih mondial menyentuh beragam aspek yang bisa menjadi suri teladan yang baik bagi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan kepentingan negara dan berbangsa.

Buku ini secara garis besar menjelaskan tentang perspektif hubungan sipil militer secara leksikal berdasarkan studi historikal. Perspektif hubungan sipil militer dalam buku ini dijelaskan secara teoritis dengan berbagai teori yang berkembang di dunia. Dimana Hubungan Sipil-Militer adalah satu perkara yang amat penting bagi satu bangsa karena berpengaruh besar ketahanan nasional suatu negara. Di dunia Barat yang berpaham liberal Hubungan Sipil Militer senantiasa berarti supremasi Sipil atas Militer, sedangkan di Republik Indonesia yang berhaluan Pancasila tidak dengan sendirinya Hubungan Sipil-Militer berarti supremasi sipil atas militer. Bahkan dengan memperhatikan bahwa Pancasila menekankan faktor kekeluargaan dan kerukunan justru tidak ada supremasi satu golongan masyarakat atas yang lain, melainkan dalam kebersamaan memperjuangkan dan mengusahakan hal yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Kami cukup menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan makalah di penyusunan makalah yang akan datang. Harapan kami semoga makalah ini bermanfaat dan memenuhi harapan berbagai pihak. Aamiin.

Bogor, Desember 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 DEFINISI HUBUNGAN SIPIL MILITER	1
A. Pandangan Umum Hubungan Sipil Militer	1
B. Definisi Hubungan Sipil Militer	10
C. Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Sipil Militer	16
D. Aspek Penting Teori Hubungan Sipil Militer	18
E. Konsepsi Teori Hubungan Sipil Militer Tradisional	18
F. Fungsi dan Faktor Penting Hubungan Sipil Militer	21
G. Konsep Militer	24
BAB 2 PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN SIPIL MILITER	27
A. Munculnya Pemerintahan	27
1. Masyarakat Setara (<i>Samenlevingen en Gelijkheid</i>)	28
2. Masyarakat Bertingkat (<i>Samenlevingen met Rangorde</i>)	29
3. Masyarakat Berlapis (<i>Gelaagde Samenlevingen</i>)	29
B. Perkembangan Pemerintahan	29
1. Pemerintahan Zaman Purba	29
a. Pemerintahan Inka	29
b. Polis Yunani	33
c. Imperium Romawi	34
d. Pemerintahan Romawi	34
2. Pemerintahan dalam Abad Pertengahan	37
a. Sistem Feodal	37
b. Konflik antara Paus dan Raja	37
c. Penafsiran Al-Kitab Ambrosius	37
d. Teori Dua Belah Pedang	37
e. Makna Aktual	38
f. Pemerintahan Romawi dan Abad Pertengahan di Negeri Belanda	38
g. Pemulihan Kekuasaan Raja	39
3. Pemerintahan di Zaman Baru	39
a. Mandiri dan Memisah	39
b. Sentralisasi	40
c. Berdirinya Negara-Negara	40
d. Pembaharuan dari Burgundi	40
e. Machiavelli	40

f. Kedaulatan.....	42
g. Absolutisme.....	42
h. Demokrasi.....	43
C. Tujuan Utama Terbentuknya Pemerintahan.....	43
1. Pemerintahan Sipil.....	44
2. Pemerintahan Militer.....	45
a. Karakteristik Pemerintahan Militer.....	46
b. Model Pemerintahan Militer (<i>Pretorianisme</i>).....	47
D. Pemerintahan Sipil dan Militer di Indonesia.....	48
E. Karakteristik dan Prinsip Dasar Demokrasi Konstitusional.....	49
F. Nilai-Nilai Fundamental Demokrasi Konstitusional.....	50
G. Keterbukaan (<i>Openness</i>).....	51
H. Trias Politika.....	51
1. Legislatif.....	51
2. Eksekutif.....	52
3. Yudikatif.....	52
BAB 3 POSISI MILITER DALAM SISTEM DEMOKRASI.....	55
A. Sejarah TNI dan Militer.....	55
B. Reformasi dan Paradigma Baru TNI.....	59
C. Penguatan Citra TNI.....	61
D. Peran Militer dalam Hubungan Internasional.....	63
BAB 4 HUBUNGAN SIPIL MILITER INDONESIA.....	65
A. Perkembangan Hubungan Sipil Militer.....	65
B. Hubungan Sipil Militer di Indonesia.....	70
C. Profesionalisme Militer.....	72
D. Partisipasi Sipil Mengelola Pertahanan.....	74
E. Membangun Hubungan Sipil-Militer yang Harmonis.....	75
F. Keterlibatan Militer dalam Kancah Politik di Indonesia.....	75
G. Militer pada Orde Lama.....	77
H. Militer pada Masa Orde Baru.....	79
I. Militer dan Politik pada Era Reformasi.....	84
J. Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Setelah Reformasi.....	86
1. Perspektif Kontrol Sipil Secara Global.....	86
K. Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Setelah Reformasi.....	92
L. Kontrol Sipil, Kebijakan Pertahanan dan Perubahan Institusional.....	93
1. Veto dan Diskresi dalam Sektor Pertahanan Indonesia.....	100
2. Formulasi dan Implementasi MEF 2010-2014.....	103
M. Politik Militer.....	110

1. Orientasi Militer Terhadap Politik.....	113
2. Model dan Faktor Intervensi.....	116
3. Birokrasi Sipil dan Hierarki Militer	118

**BAB 5 MANAJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN SIPIL MILITER UNTUK
PERTAHANAN NEGARA**

BAB 5 MANAJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN SIPIL MILITER UNTUK PERTAHANAN NEGARA	125
A. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia.....	126
B. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia.....	130
C. Profesionalisme dan Kompetensi Personil Militer	133
D. Profesionalisme dan Kompetensi Personil Sipil	143
E. Penjaga Profesi	156
1. Pelatihan Berkelanjutan dan Pengembangan Karier	157
2. Evaluasi Kinerja dan Sertifikasi Kompetensi	161
3. Peran Pendidikan Militer dalam Pembentukan Profesionalisme	163
F. Integrasi Sipil-Militer	164
1. Kolaborasi antara Instansi Sipil dan Militer	165
2. Program Pelatihan Bersama dan Penelitian Kolaboratif.....	166
3. Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman antara Sipil dan Militer	167
G. Moral dan Etika Personil Militer.....	168
1. Pendidikan dan Pembinaan Karakter.....	169
2. Implementasi Nilai-Nilai Etika dan Moral dalam Tugas Militer ..	170
3. Pengawasan dan Penegakan Disiplin Militer	172
4. Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	173
H. Respons Terhadap Perubahan Teknologi dan Sosial.....	174
1. Rekrutmen dan Retensi Talenta untuk Kebutuhan Operasional Masa Depan	175
2. Pengembangan Strategi Pengembangan SDM yang Fleksibel dan Inovatif	176
3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Operasional	177
I. Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya yang Cermat	178
1. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Perencanaan Sukses.....	179
2. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan SDM	180
J. Dialog Konstruktif antara Komponen Sipil dan Militer.....	180
1. Kebijakan yang Inklusif untuk Mengatasi Potensi Konflik	182
2. Program Pengembangan untuk Memperkuat Kohesi Nasional... ..	183
3. Pembangunan Kepercayaan Publik Terhadap Militer.....	184
K. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen SDM Militer.....	185
1. Komunikasi Efektif antara Militer dan Masyarakat	186

2.	Peran Militer dalam Bantuan Kemanusiaan dan Operasi <i>Non-Kombatan</i>	187
3.	Kesiapan Menghadapi Ancaman Multidimensi	188
L.	Program Pengembangan Kepemimpinan dan Manajerial	189
1.	Kesejahteraan dan Motivasi Personil Militer	191
2.	Kesetaraan Gender dan Inklusi dalam Militer	192
3.	Pembelajaran dari Pengalaman Internasional	193
DAFTAR PUSTAKA		195
PROFIL PENULIS		208

BAB 1

DEFINISI HUBUNGAN SIPIL MILITER

A. PANDANGAN UMUM HUBUNGAN SIPIL MILITER

Hubungan Sipil-Militer adalah satu perkara yang amat penting bagi satu bangsa karena berpengaruh besar ketahanan nasional suatu negara. Hal itu juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Pengertian Hubungan Sipil-Militer semula tidak dikenal di Indonesia dan baru dipergunakan setelah pengaruh dunia Barat, khususnya yang berpandangan liberal semakin kuat. Mula-mula itupun terbatas pada kalangan terpelajar yang banyak berhubungan dengan ilmu sosial yang berasal dari dunia barat. Namun, lambat laun pengertian itu menyebar pada semua kalangan dan sekarang sudah menjadi pengertian yang diakui dan dipergunakan secara umum di Indonesia. Namun ada satu perbedaan yang menonjol dalam penggunaan pengertian itu antara mereka yang hidup dalam alam sosial barat dengan bangsa Indonesia yang menerima dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Di dunia Barat yang berpaham liberal Hubungan Sipil Militer senantiasa berarti supremasi Sipil atas Militer, sedangkan di Republik Indonesia yang berhaluan Pancasila tidak dengan sendirinya Hubungan Sipil-Militer berarti supremasi sipil atas militer. Bahkan dengan memperhatikan bahwa Pancasila menekankan faktor kekeluargaan dan kerukunan justru tidak ada supremasi satu golongan masyarakat atas yang lain, melainkan dalam kebersamaan memperjuangkan dan mengusahakan hal yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Perlu ditetapkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan Sipil dan Militer dalam pengertian Hubungan Sipil-Militer. Perkataan Sipil merupakan satu pengertian yang menyangkut kewarganegaraan (*Webste's Ninth New Collegiate Dictionnary: Civil: relating to citizens*). Dapat dikatakan bahwa Sipil adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat, atau warga negara pada umumnya. Sedangkan perkataan Militer merupakan pengertian yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata. Secara kongkrit perkataan Sipil di Indonesia adalah seluruh masyarakat, sedangkan perkataan Militer berarti Tentara Nasional Indonesia, yaitu organisasi yang merupakan kekuatan bersenjata dan harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Karena Sipil berarti masyarakat, maka sebenarnya Militer pun bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, di Indonesia sebelum terpengaruh oleh pandangan Barat dipahami bahwa TNI adalah bagian tak terpisahkan

BAB 2

PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN SIPIL MILITER

A. MUNCULNYA PEMERINTAHAN

Seorang manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia tidak terlepas dari peraturan dan norma sehingga kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain dan kemudian oleh Ibnu Khaldun disimpulkan bahwa “manusia adalah makhluk sosial”. Sebelum mengenal pemerintahan yang sekarang ini manusia hidup dalam suasana konflik untuk mempertahankan diri sendiri. Pemaksaan dan pelanggaran hak orang lain dilakukan oleh mereka yang kuat terhadap yang lemah. Hobbes menjelaskan konflik-konflik itu sebagai suatu keadaan perang antara “semua melawan semua”. Huru hara tidak bisa dihindarkan, mereka yang kuatlah yang menikmati kebebasan. Sampai lahir kesadaran dari kalangan orang kuat yang menjadi orang bijaksana untuk menciptakan situasi masyarakat yang teratur dan bagaimana ketertiban itu dapat dipelihara. Pelaku tindak kejahatan harus dihukum. Berdasarkan kesepakatan itu dibuatlah prinsip-prinsip nilai yang kelak dapat dianggap sebagai aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya yang disepakati bersama oleh semua anggota masyarakat. Pada fase awal pemberian sanksi hukuman dilakukan melalui tindakan penyiksaan fisik seperti potongan tangan, cambuk dan penyaliban. Dalam perkembangan selanjutnya sejalan dengan pesatnya peradaban manusia yang semakin menyadari makna harga dari keberadaan sebuah pribadi yang tidak layak untuk ditukar mutlak dengan kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukannya, maka diciptakanlah institusi yang lebih berfungsi sebagai usaha perbaikan atau rehabilitasi yaitu penjara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk pertama dari pemerintahan modern setelah dibuatnya “hukum” adalah penjara. Dari perspektif ini munculnya suatu negara atau pemerintahan pada awalnya ketika lahirnya kebutuhan bersama manusia akan ketertiban hidup dan aturan-aturan hukum yang berlaku secara sah. Keberadaan suatu negara atau pemerintahan tergantung kepada ada atau tidaknya hukum yang menjadi aturan masyarakat di dalamnya. Artinya, tidak ada pemerintahan tanpa hukum, dan tidak ada hukum tanpa pemerintahan. Hukum adalah jiwa dari setiap kekuasaan negara.

BAB 3

POSISI MILITER DALAM SISTEM DEMOKRASI

A. SEJARAH TNI DAN MILITER

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI lahir di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai jawaban atas kebutuhan adanya kesatuan tentara untuk merespon ancaman Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia melalui konflik bersenjata. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang.

BKR juga tidak berada dibawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai

BAB 4

HUBUNGAN SIPIL MILITER INDONESIA

A. PERKEMBANGAN HUBUNGAN SIPIL MILITER

Pola hubungan sipil-militer memiliki berbagai variasi. Bagus A. Hardito (1999:144) menggolongkan pola hubungan sipil-militer dapat berupa dominasi sipil atas militer atau dominasi militer atas sipil, dapat pula terbentuk kesejajaran antara keduanya dalam mencapai tujuan politik suatu negara. Sistem rezim pemerintahan yang dianut oleh suatu negara memiliki pengaruh terhadap pola hubungan sipil-militer. Pola hubungan sipil-militer dalam sistem demokratik liberal menganut pada supremasi sipil. Hubungan sipil-militer dalam negara demokratis ditunjukkan Samuel P. Huntington (1957:80-99) melalui dua cara yakni:

1. Kontrol sipil subyektif (*subjective civilian control*), pengendalian ini dilakukan dengan meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan sipil. Inti dari kontrol sipil subyektif adalah pengingkaran independensi militer.
2. Kontrol sipil obyektif (*objective civilian control*), pengendalian cara ini dilakukan dengan memaksimalkan profesionalisme militer, kekuasaan militer akan dikurangi namun diberikan kekuasaan dalam batas tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Kontrol sipil obyektif tidak hanya dilakukan dengan upaya meminimalisasi intervensi militer, namun juga memerlukan keunggulan otoritas sipil yang terpilih (*elected politicians*) dalam semua bidang politik termasuk dalam penentuan anggaran militer, konsep dan strategi pertahanan nasional, peralatan persenjataan militer, dan perumusan kurikulum serta doktrin militer.

Sedangkan pada sistem otoritarian, pola hubungan sipil-militer lebih menekankan pada dominasi peran militer. Dalam rezim militer tidak ditemukan adanya kontrol sipil dan organisasi militer melakukan tugas-tugas diluar misi pertahanan keamanan (Huntington, 1957:99). Amos Permutter (1980:203-205) menjelaskan dua kondisi sebagai peluang bagi militer melakukan intervensi. Pertama, kondisi sosial. Adanya kelas-kelas sosial masyarakat yang terpecah belah akibat kepentingan kelompok sehingga tidak mampu melancarkan aksi terpadu dan rendahnya tingkat aksi sosial menjadikan tidak adanya kontrol sosial efektif. Kedua, kondisi politik. Struktur formal negara yang lemah atau disorganisasi, persoalan-persoalan sipil yang selalu kembali ke militer untuk mendapatkan dukungan ketika struktur politik

BAB 5

MANAJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN SIPIL MILITER UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas bagaimana hubungan sipil militer di Indonesia dan berbagai perspektif teori didalamnya. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks hubungan sipil-militer memegang peranan yang sangat penting bagi pertahanan negara. Dalam era modern yang ditandai oleh kompleksitas ancaman dan dinamika geopolitik, keterpaduan antara elemen sipil dan militer menjadi kunci dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional. Manajemen SDM yang baik memastikan bahwa personil militer memiliki profesionalisme dan kompetensi yang tinggi melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan karier, dan evaluasi kinerja, sehingga mereka siap menghadapi berbagai tantangan. Kualitas SDM yang unggul tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional militer, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi militer sebagai penjaga keamanan negara. Selain itu, manajemen SDM berperan dalam memastikan integrasi yang efektif antara komponen sipil dan militer. Kolaborasi antara instansi sipil seperti pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat dengan militer sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman multidimensi seperti terorisme, bencana alam, dan krisis kesehatan. Manajemen SDM yang strategis dapat mengembangkan program pelatihan bersama, proyek penelitian kolaboratif, dan pertukaran pengetahuan yang memperkuat sinergi antara kedua pihak.

Lebih lanjut, moral dan etika personil militer adalah fondasi penting dalam menjaga integritas dan reputasi angkatan bersenjata. Manajemen SDM berperan dalam menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang kuat melalui pendidikan dan pembinaan karakter, memastikan personil militer memiliki komitmen moral yang tinggi untuk menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi sangat penting. Manajemen SDM yang efektif mampu merespons perubahan dalam lingkungan strategis, teknologi, dan sosial, termasuk kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan talenta yang sesuai dengan kebutuhan operasional masa depan serta mengembangkan strategi pengembangan SDM yang fleksibel dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Badron, M. S. (2016). Effective Communication Strategy in Military. *International Journal of Public Administration and Management Research*, 3(2), 45-56.
- Ahmadi, A. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anderson, B.R.O.G. (2006). *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Cornell University Press.
- Andrews, Brandy M., 2008. "Patterns of Civil-Military Relations In Democracies", dalam *School of Advanced Military Studies Bruneau*,
- Ansary, Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam. 2012. Penerbit Zaman: Jakarta.
- Ansoff, I. H. (1965). *Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion*. McGraw-Hill Education.
- Armstrong, M. (2012). *Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance*. Kogan Page Publishers.
- Armstrong, M. (2017). *Armstrong's Handbook of Strategic Human Resource Management*. Kogan Page Publishers.
- Army Doctrine Publication 6-22.1. (2020). *The Human Dimension in Leadership*. Washington, DC: U.S. Department of the Army.
- Aspikom. (2002). *Komunikasi dan Ketahanan Militer: Membangun Kembali Kedaulatan dan Kepentingan Nasional NKRI*. Bandung: Aspikom.
- Australian Defence Force Academy. (2022). "Regional Security Cooperation in the Indo-Pacific: Case Studies and Strategic Implications."
- Avolio, B. J., & Yammarino, F. J. (Eds.). (2013). *Transformational and Charismatic Leadership: The Road Ahead*. Emerald Group Publishing.
- Aydinli, Ersel. 2006. *The Turkish Military's March toward Europe*, *Journal of Council on Foreign Relations*.
- Badan Intelijen Pertahanan. (2020). "Sinergi Respons Terhadap Perubahan Teknologi dan Sosial: Strategi Penting dalam Pertahanan Negara." *Buletin Pertahanan*, vol. 15, no. 3, pp. 25-38.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Basu, T. (2016). *Decoding Japan's Security Discourse: Diverse Perspectives*. *India Quarterly*, 72(1), pp. 30-49.

- Basuki, A. Y. (2014). Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 135-166.
- Bechet, T. P. (2015). *Strategic Staffing: A Comprehensive System for Effective Workforce Planning*. AMACOM.
- Bellamy, Alex J., and Paul D. Williams, eds. *Providing Peacekeepers: The Politics, Challenges, and Future of United Nations Peacekeeping Contributions*. Oxford University Press, 2013.
- Betz, D. (2004). *Civil-Military Relations in Russia and Eastern Europe*. New York: Routledge Curzon.
- Blais, C. (2010). *Who's in Charge? Defense Policy Formation in Japan*, Monterey: Naval Postgraduate School.
- Bland, DL (2000) Siapa yang Memutuskan Apa? Hubungan Sipil-Militer di Kanada dan Amerika Serikat. *Kebijakan Publik KanadaAmerika* 41, 1–22.
- Blenkinsopp, J., Tombs, S., & Whyte, D. (2012). Transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam manajemen SDM militer. *Jurnal Etika Militer*, 10(2), 145-162.
- Boettcher, TD (1992) Panggilan Pertama: Pembuatan Militer AS Modern, 1945–1953. Boston: Kecil, Coklat.
- Brooks, R., & Watkins, A. (2017). *Military Strategy: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Brooks, RA (2008) *Membentuk Strategi: Politik Sipil-Militer Penilaian Strategis*. Princeton: Universitas Princeton
- Brown, C. D. (2019). The Role of Military in Humanitarian Activities: Building Public Trust. *Journal of Military Ethics*, 18(3), 275-290.
- Buente, Marco. 2011. "Burma's Transition to "Disciplined Democracy" Abdication or Institutionalization of Military Rule?". Working Papers. Giga Research.
- Builder, CH (1989) *Topeng Perang: Gaya Militer Amerika dalam Strategi dan Analisis*. Baltimore: Pers Universitas Johns Hopkins.
- Bundeswehr Command and Staff College. (2023). "Leadership Development in the German Armed Forces: Best Practices and Case Studies."
- Burke, J. (1993) Morris Janowitz dan Asal Usul Penelitian Sosiologi Angkatan Bersenjata dan Masyarakat. *Angkatan Bersenjata dan Masyarakat* 19, 167–86.
- Burke, J. (1998) *The Adaptive Military: Armed Forces in a Turbulent World*, 2nd edn. New York: Transaksi.
- Canberra, 1997. Tam, A. H., "Coercion and Governance in China: Analyzing Civil-Military Relations In The Post Deng Era Using Multiaah Alagappa's Analytical Framework", Lieutenant US Navy, Thesis US NPS, MA in

- National Security Affairs, 2006. Yamaguchi, N., dan Welch, D. A., "Soldiers, Civilians, and Scholars: Making Sense Of The Relationship Between Civil-Military Relations and Foreign Policy", *ASIAN Perspective*, vol. 29, no.1, 2005.
- Caraley, D. (1965) *Politik Penyatuan Militer: Studi Konflik dan Proses Kebijakan*. New York: Columbia University Press.
- Caudron, S. (2018). *Strategic Staffing: A Comprehensive System for Effective Workforce Planning*. SHRM Foundation.
- Chapel Hill: University of Brooks, RA (2008) *Membentuk Strategi: Politik Sipil-Militer Penilaian Strategis*. Princeton: Universitas Princeton
- Cohen, C. von (1976) *On War*, ed. dan trans. P. Paret dan M. Howard. Princeton: Pers Universitas Princeton.
- Cohen, EA (2001) *Senja Prajurit Warga*. *Parameter* 31, 23–8.
- Cohen, EA (2002) *Komando Tertinggi: Prajurit, Negarawan, dan Kepemimpinan di Masa Perang*. New York: Jangkar.
- Cohen, SP (1984) *Tentara Pakistan*. Berkeley: Pers Universitas California.
- Cohen, SP (1984) *Tentara Pakistan*. Berkeley: Pers Universitas California.
- Cohen, SP (2002) *Tentara India*. Oxford: Oxford University Press.
- Cress, LD (1982) *Warga Bersenjata: Angkatan Darat dan Milisi di Masyarakat Amerika hingga Perang 1812*.
- Cribb, R. (2001). *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Monash Papers on Southeast Asia.
- Crocker, Chester A., Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, eds. *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*. US Institute of Peace Press, 2018.
- Crouch, H. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- Daft, R. L. (2014). *The Leadership Experience* (6th ed.). Cengage Learning.
- Deborah N. *The Soldier, The State, and the Separation of Power*, dalam, <http://www.texasrev.com/wp-content/uploads/Pearlstein-90-TLR-797.pdf> Rahbek-Clemensen, Jon. *Beyond The Soldier and State* dalam, http://etheses.lse.ac.uk/782/1/_lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Etheses_Content_Theses%20submitted%20by%20students%20%26%20alum%20ni_Live%20theses_Rahbek-Clemmensen_Beyond%20soldier%20and%20state.pdf
- Jurnal Andry, Brandy. "Patterns of Civil-Military Relations In Democracies". M,Maj US Army. School of Advanced Military Studies. US Army Command and General Staff Coll. Fort Leavenworth
- Dept of Joint,Interagency,and Multinational Operations. US Army Command and General Staff Coll. 2010. Huntington, Samuel P. *Civillian Control and the Constution*. American Political Science Association, vol. 50, No.

- 3, hal. 676-699. Kimminau, Jon A. "Civil-Military Relations and Strategy: Theory and Evidence". Lt Col USAF.
- Desch, M. (2008) *Kekuasaan dan Efektivitas Militer: Kekeliruan Triumfalisme Demokratis*. Baltimore: Pers Universitas Johns Hopkins.
- Diamond, Larry & Marc F. Plattner (ed.), *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, pendahuluan (hal.ix)
- Fuentes, Claudio A., *After Pinochet: Civilian Policies Toward the Military in the 1990s Chilean Democracy*, *Journal of Interamerica Studies and World Affairs*, Fall, 2000,
http://findarticles.com/p/article/mi_qa3688/is_200010/ai_n8922430/p_g_13-49k-, diakses 30 Januari 2007
- Human Right Watch Briefing Paper, September 2003, *Discreet Path to Justice? Chile, Thirty After the Military Coup*,
www.hrw.org/background/Americas/chile/chile0903.pdf diakses 11 Oktober 2006
- Montes, J. Esteban dan Tomas Vial, *The Role of Constitution-Building Processes in Democratization*,
<http://www.idea.int/conflict/cbp/upload/CBPChile.pdf> diakses pada 7 Mei 2007
- Dieter, N., *Kamus Dunia Ketiga*, Grasindo, Jakarta, 1994.
- Dower, J. (1999). *Embracing Defeat: Japan in Aftermath of World War II*. London: Penguin.
- Duffield, Mark. *Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security*. Zed Books, 2020.
- Dunlap, C. (1992) *Asal Usul Kudeta 2012*. *Parameter* (Musim Dingin), 2–20.
- EA (2002) *Komando Tertinggi: Prajurit, Negarawan, dan Kepemimpinan di Masa Perang*. New York: Jangkar.
- Elson, R.E. (2001). *Suharto: A Political Biography*. Cambridge University Press.
- Fatton, L. (2015). *Do Shinzo Abe's Defense Initiatives Matter?* [Online] dari <https://thediplomat.com/2015/06/do-shinzo-abetesdefense-initiatives-matter/> diakses 20 Mei 2018.
- Fiaji, Reksa. 2013. *Analisis Kemenangan Adalek Ve Kalkinma Partisi (AKP) Dalam Pemilu Turki 2011*, *Jurnal Hubungan Internasional Fisip Unmul*.
- Finer, S. (2002). *The Man on Horseback: the Role of Military in Politics*. New Brunswick: Transaction Publisher.
- Globalfirepower. (2017). *Globalfirepower*. [Online] dari https://www.globalfirepower.com/country-military-strengthdetail.asp?country_id=japan diakses 19 Januari 2018.
- Fraenkel, J., *the 2006 Military Takeover in Fiji: A Coup to End All Coups?*, ANU E Press, Canberra, 2009.
- Huntington, S. P., *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968.
- Gates, Robert M. "Duty: Memoirs of a Secretary at War." Vintage, 2015.

- Geneva: ICRC. RI. (2001). Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia. RI. (2010). Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.
- Grant, R. M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases*. Wiley.
- Hagstorn, L. (2010). The Democratic Party of Japan's Security Policy and Japanese Politics of Constitutional Revision: a Cloud over Article 9. *Australian Journal of International Affairs*, 64(5), pp. 510-525.
- Harold., 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, A. (2019). Integrating Civil-Military Relations in National Development: Strategies for Enhancing National Unity. *Strategic Studies Quarterly*, 5(1), 78-91.
- He Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security. (2008). *Report of the Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security*, Tokyo: The Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security.
- _____. (2014). *Report of the Advisory Panel on Reconstruction of Legal Basis for Security*, Tokyo: The Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security.
- Heidelberg: Springer. Sarwanto, Abi. 2016. "TNI AD Siapkan Lahan Latihan Tank Leopard di Sukabumi," CNN Indonesia. 1 Maret. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301131848-20-114553/tni-ad-siapkan-lahan-latihan-tank-leopard-di-sukabumi/>. (4 Februari 2017).
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. New York: Wiley.
- Hiketani, T. (2009). Japan's Changing Civil-Military Relations: From Containment to Re-engagement? [Online] dari https://www.globalasia.org/v4no1/cover/japans-changing-civil-militaryrelations-from-containment-to-re-engagement_takako-hikotan diakses 25 Mei 2018.
- _____. (2014). *The Paradox of Antimilitarism: Civil-Military Relations in Post-World War II Japan*, New York: Colombia University. Huntington, S. P. (2000). *The Soldier and the State* (15th ed.). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Hitrov, Todor Stoyanov, 2004, "Civil-Military Relations In Post-Communist Countries", dalam MA Thesis US NPS in Security Studies (Civil-Military Relations)

- Hooker, Richard D. *Soldiers of The State; Reconsidering American Civil-Military America*, dalam, <http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/2011winter/hooker.pdf> Pearlstein,
- Horn, B. (2014). *Understanding Cultural Context in Military Communication*. *Journal of Military Studies*, 8(1), 67-82.
- Howard, Lise Morje. *UN Peacekeeping in Civil Wars*. Cambridge University Press, 2017.
- Howard, Michael. "The Invention of Peace: Reflections on War and International Order." Yale University Press, 2002.
- Huntington, P. Samuel. 1957. *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge.
- Huntington, S.P., *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil Military Relations*, Belknap Press, New York, 1957. Lal, B. V., *Islands of Turmoil: Elections and Politics in Fiji*, ANU E Press, Canberra, 2006.
- Huntington, Samuel P. 1985. "The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil Military Relations". The Belknap Press of Harvard University Press. United States.
- Huntington, Samuel, 1957. *The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil Military Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 1957.
- Japan Ministry of Defense. (2017). *Defense of Japan*. Tokyo: Japan Ministry of Defense. Japantimes. (2001). LDP panel to pitch collective self-defense. [Online] dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2001/03/18/national/ldp-panel-to-pitch-collective-self-defense/#.WwfWgJ2Ud4o> diakses 22 April 2018.
- Jenkins, D. (1984). *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*. Cornell University Press.
- Jensen, M. (2002). *The Making of Modern Japan* (1 ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Johnson, Douglas dan Metz Steven, 1995. "American Civil-Military Relations: New issues, Enduring Problems", dalam *US Army War Coll Monograph*.
- Johnson, E. F. (2017). *Communication Strategies for Military-Public Relations*. *Journal of Strategic Communication*, 12(1), 88-105.
- Johnson, G., Whittington, R., & Scholes, K. (2019). *Exploring Strategy: Text and Cases*. Pearson Education Limited.
- Jones, M. (2018). *Building Public Trust in Military Organizations: A Strategic Approach*. *Journal of Defense Studies*, 15(2), 45-67.
- Kansas. 2008. Benet, David. "The Trinity: A New Approach To Civil-Military Relations". J,Maj USAF. Thesis US NPS.

- Kantei. (2018). Prime Minister of Japan and His Cabinet. [Online] dari http://www.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html diakses pada 19 September 2016.
- Karlsrud, John. *The UN at War: Peace Operations in a New Era*. Palgrave Macmillan, 2017.
- Kavanagh, M. J., & Thite, M. (2019). *Human Resource Information Systems: Basics, Applications, and Future Directions*. SAGE Publications.
- Kellaway, K. (2016). Praktik Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen SDM Militer: Studi Kasus Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Manajemen Militer*, 8(1), 32-45.
- Leoczowski, George. 1962. "The Middle East In The World Affairs". New York: TP. Momayezi, Nasser. 1998. Civil-Military Relations in Turkey, *International Journal on World Peace*, Vol. 15, No. 3.
- Lev, D. S. (1966). *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Cornell Modern Indonesia Project.
- Li, H., Li, H., Li, H., & Li, H. (2018). The impact of technology-based training on military personnel development. *Journal of Military Studies*, 20(2), 45-60.
- Liberal Democratic Party. (2018). *LDP Constitution: Chapter IV Policy Research Council*. [Online] dari <https://www.jimin.jp/english/about-ldp/constitution/104178.html> diakses 22 April 2018.
- Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2019). *Leadership: Theory, Application, & Skill Development*. Cengage Learning.
- Lussier, R. N., & Hendon, J. R. (2016). *Human Resource Management: Functions, Applications, and Skill Development*. SAGE Publications.
- Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach*. New York: McGraw-Hill.
- MA in National Security Affairs. 2006. Weinrub, Alan. "The Evolution of Israeli Civil-Military Relations: Domestic Enablers and the Quest For Security". Lieutenant US Navy. Thesis US Naval Postgraduate School, MA in Security Studies. 2009. Yamaguchi, Noboru dan Welch, David A. "Soldiers, Civilians, and Scholars: Making Sense Of The Relationship Between Civil-Military Relations and Foreign Policy". *ASIAN Perspective*. Volume 29, No.1. 2005. Buku Huntington, Samuel P. *The Soldier and The States: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge: Belknap Press of Harvard
- MA In National Security Affairs. 2007. Conelly, Donald B. "The Unequal Professional Dialogue: American Civil-Military Relations and The Professional Military Ethic".

- Maki, J. (1990). The Constitution of Japan: Pacifism, Popular Sovereignty, and Fundamental Human Rights. *Law and Contemporary Problems*, 53(1), pp. 73-87.
- Martinez, G. (2016). The Importance of Dialogue in Building Public Trust: Lessons from Military-Civil Society Interactions. *International Journal of Conflict Resolution*, 8(2), 203-220.
- Martocchio, J. J., & Baldwin, T. T. (2018). Human Resource Management in the Military: A Review and Implications for Future Research. In *The Oxford Handbook of Military Psychology* (pp. 205-220). Oxford University Press.
- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.
- McGrath, J. (2020). *War and Technology: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- McVey, R.T. (2006). *The Rise of Indonesian Communism*. Cornell University Press.
- Mearsheimer, John J. "The Tragedy of Great Power Politics." W.W. Norton & Company, 2014.
- Melzer, N. (2009). Interpretive guidance on the notion of Direct Participation in Hostilities under international humanitarian law.
- Miller, J. B. (2014). Abe Gambit: Japan Reorient its Defense Posture. *World Affairs*, 176(6), pp. 55-61.
- Ministry of Defence, United Kingdom. (2019). "Defence Transformation: Joint Doctrine Publication 0-10."
- Ministry of Defense. (2023). *Strategic Plan for National Cohesion: Building Unity and Solidarity in the Military*. Jakarta: Ministry of Defense Press.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. Simon and Schuster.
- Mooney, Thomas K. 1991. "Military Intervention, Kemalism, and Politics in Turkey". University of Rhode Island.
- Muhammad, A. (2012). The Spread of Democracy and International Security. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), pp. 56-62.
- Mulgan, A. (2003). Japan's 'Un-Westminster' System: Impediment Reform in Economic Crisis. *Government and Opposition*, 38(1), pp. 73-91.
- Nasution, A.H. (1963). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (vol. 1). Penerbit Bulan Bintang.
- Nordlinger, E. A., *Militer dalam Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
 Reilly, B., *Constitutional Engineering and the Alternative Vote in Fiji*, National Centre for Development studies,

- Norris, M., Hyde, A., & Kollar, L. (2017). Gender diversity and team performance in military and security contexts. *Military Psychology*, 29(6), 473-485.
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and Practice*. Sage Publications.
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice*. SAGE Publications.
- Ohio State Univ Dissertation (Political Science). 2001. Nielsen, Suzanne C. "Political Control Over The Use Of Force: A Clausewitzian Perspective".
- Panduwinata, B. (2019). "Menyikapi Perubahan Sosial: Tantangan dan Strategi dalam Konteks Militer." *Jurnal Kebijakan Pertahanan*, vol. 10, no. 1, pp. 78-92.
- Pemayun, A. (2017). "Strategi Pengembangan Teknologi dalam Konteks Militer." *Jurnal Pertahanan*, vol. 5, no. 2, pp. 45-60.
- Penders, C.L.M. (1974). *The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia 1945-1962*. University of Hawaii Press.
- Pendit, G. (2020). "Supremasi Sipil dalam Dialog Konstruktif dengan Militer: Perspektif Hukum dan Politik." *Majalah Pertahanan*, 35(4), 78-92.
- Peter D. F., Hikotani, T., & Narine, S. (2005). *Civilian Control and Civil-Military Gaps in the United States, Japan, and China*. *Asian Perspective*, 29(1), pp. 233-271.
- Pettyjohn, S. L., & Weiss, A. S. (2018). Transparency and Accountability in Military Communication. *Journal of Security and Defense Studies*, 5(3), 112-125.
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 17- 28.
- Pollmann, M. (2015). Japan's Defense Ministry Seeks to Roll Back Civilian Control. [Online] dari <https://thediplomat.com/2015/02/japans-defense-ministry-seeks-to-roll-back-civilian-control/> diakses 20 Mei 2018.
- Prasetyo, B. (2019). "Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Sipil-Militer dalam Membangun Ketahanan Nasional." *Jurnal Pertahanan*, 20(3), 102-115.
- Prayudi. (2018). "Kebijakan Keamanan dan Dialog Konstruktif antara Komponen Sipil dan Militer: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional*, 12(2), 45-60.
- Public Relations Office. (2012). *Outline of "Public Opinion Survey on the Self-Defense Forces (SDF) and Defense Issues,"* Tokyo: Cabinet Office.
- Pugliese, G. (2016). *Kantei Diplomacy? Japan's Hybrid Leadership in Foreign and Security Policy*. *The Pacific Review*, 30(2), pp. 1-17.
- Ritcher, J. (2016). Japan's 'Reinterpretations' of Article 9: a Pyrrhic 47 Victory for American Foreign Policy. *Iowa Law Review*, Volume 101, pp. 1223-1262.

- Pulakos, E. D. (2009). *Performance Management: A New Approach for Driving Business Results*. John Wiley & Sons.
- RAND Corporation. (2020). "Military Lessons Learned from Recent International Operations."
- Raymond, Gregory V. 2017. "Naval Modernization in Southeast Asia: Under the Shadow of Army Dominance?" *Contemporary Southeast Asia* 39 (No. 1): 149–77.
- Restanto, Reska K. 2015. "Profil Pesawat F-16 yang terbakar di Halim Perdanakusuma," *Kompas*. 16 April. <http://tekno.kompas.com/read/2015/04/16/10443747/Profil.Pesawat.F-16.yang.Terbakar.di.Halim.Perdanakusuma> (5 Februari 2017).
- Ricklefs, M.C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Rocco, Philip dan Chloe Thurston. 2014. "From Metaphors to Measures: Observable Indicators of Gradual Change." *Journal of Public Policy* 34 (1): 35-62.
- Rothwell, W. J., & Kazanas, H. C. (2010). *Planning and Managing Human Resources: Strategic Planning for Human Resources Management*. Human Resource Development.
- Rothwell, W. J., & Lindholm, J. E. (2013). *Succession Planning Basics*. American Society for Training and Development.
- Roza, R. (2012). Dual-Use Technology Jepang dan Kepentingan Keamanan Nasional Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2), pp. 107-122.
- Rüland, Jurgen dan Maria Gabriela Manea. 2012. "The Legislature and Military Reform in Indonesia" dalam *The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria*. Jurgen Rüland, Maria Gabriela Manea, dan Hans Born (Eds.).
- Saideman, S. (2018). *Japan Civil-Military Relations after Reinterpretation of Article 9* [Wawancara] (22 Mei 2018).
- _____. (2018). *Japanese Civil-Military Relations*. [Online] dari <https://researchmatters.ssrc.org/japanese-civil-military-relations/> diakses 22 April 2018.
- Schier, J. G. (2000). *Military manpower and personnel policy*. In *The Oxford Handbook of Military Psychology*. Oxford University Press.
- Sebastian, Leonard C. 2006. *Realpolitik Ideology: Indonesia's Use of Military Force*. Singapore: ISEAS.
- Sebata, T. (2008). Is Japan Becoming a 'Normal States' in Civil Military Relations? *East-West Studies*, 20(1), pp. 95-221.

- Seno, Haryo Adjie Nogo. 2012. Indonesia's problematic defence procurement priorities,
<https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-problematic-defence-procurement-priorities/>. (4 Februari 2017).
- Setyanto, Y., & Loisa, R. (2012). Kementerian Pertahanan: Budaya Militer di Institusi Sipil ? 2012: UPN Veteran Yogyakarta.
- Siaroff, Alan. 2000. Comparative European Party Systems. An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945. New York: Sage.
- Siaroff, Alan. 2009. "Comparing Peri, Yoram. 2002. "The Israeli Military and Israel's Palestinian Policy". United States Institute of Peace". Washington.
- Sihbudi, Riza. 2007. Menyandra Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim, Mizan: Jakarta.
- Sims, R. (2001). Japanese Political History since the Meiji Renovation 1868-2000 (1 ed.). New York: Palgrave. T
- Sjarief, A. (1996). Hukum disiplin militer Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujito, A. (2002). Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 121-138.
- Smith, A. B. (2020). Transparency and Accountability in Military Operations. International Journal of Security Studies, 25(4), 112-130.
- Smith, J. (2020). Strengthening National Cohesion: A Case Study of Military Development Programs. Journal of National Unity, 10(2), 45-62.
- Stepan, Alfred. 1988. Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone. Princeton: Princeton University Press.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2021). "Trends in International Arms Transfers."
- Streeck, Wolfgang dan Kathleen Thelen. 2005. "Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies" dalam Wolfgang Streeck dan Kathleen Thelen (Eds.). Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. Oxford: Oxford University Press.
- Strohmeier, S. (2007). Research in e-Human Resource Management: A Review of the Literature. In E-Human Resources Management: Managing Knowledge People (pp. 1-18). IGI Global.
- Sudrajat, S. (2017). "Kolaborasi dalam Pengembangan Kapasitas dan Teknologi untuk Keamanan Nasional." Jurnal Teknologi Pertahanan, 5(1), 30-45.

- Sugiyarto. 2017. "Tank Leopard di Jawa Akan Diangkut ke Perbatasan Perlu Jalur KA yang Mantap," *Tribunnews*. 3 Agustus.
<http://www.tribunnews.com/regional/2017/08/03/tank-leopard-di-jawa-akan-diangkut-ke-perbatasan-perlu-jalur-ka-yang-mantap>. (4 Februari 2017).
- Supriyanto, Ristian A. 2016. "The Superficiality of Indonesia's Defense Policy," *The Jakarta Post*. 15 Juni.
<http://www.thejakartapost.com/academia/2016/06/15/the-superficiality-of-indonesias-defense-policy.html>. (5 Februari 2017).
- Suryohadiprojo, S. (1999). *Hubungan-Sipil Militer di Indonesia: Suatu Pembahasan*. Jakarta: FISIP UI.
- Suryokusumo, S. (2006). *Konsep Pertahanan Non Militer*. Jakarta: Pustaka Obor.
- The Law Library of Congress. (2015). *Japan: Interpretations of Article 9 of the Constitutions*. s.l.: Global Legal Research Center.
- Traphagan, J. (2012). *How Japan Sees its Military*. [Online] dari <https://thediplomat.com/2012/08/how-japan-sees-its-military/> diakses 22 May 2018.
- Yoshida, R. (2008). *Tamogami — history again retold*. [Online] dari https://www.japantimes.co.jp/news/2008/11/11/national/tamogami-history-again-retold/#.Wwja_Z2Ud4o diakses 26 Mei 2018
- Thelen, Kathleen. 1999. "Historical Institutionalism in Comparative Politics." *Annual Review of Political Science* 2: 369–404.
- Thomas C., 2001. "Ministries Of Defense And Democratic Civil-Military Relations", dalam *Naval Postgraduate School (US NPS) Crouch*,
- Trinkunas, Harold. 2001. "Crafting Civilian Control in Argentina and Venezuela" dalam *Civil-Military Relations in Latin America: New Analytical Perspectives*. David Pion-Berlin (Ed.). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Trinkunas, Harold. 2005. *Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela: A Comparative Perspective*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Tsebelis, George. 2000. "Veto Players and Institutional Analysis." *Governance: An International Journal of Policy and Administration* 13 (No. 4): 441-474.
- Tsebelis, George. 2002. *Veto Players: How Political Institutions Work*. Princeton: Princeton University Press.
- United States Army: Washington DC. 2009. Tam, Andrew H. "Coercion and Governance in China: Analyzing Civil-Military Relations In The Post-Deng Era Using Multiah Alagappa's Analytical Framework". Lieutenant US Navy. Thesis US NPS.

- University Press. 1957. _____ Political Order in Changing Societies. Yale University Press: New Haven. 1968.
- US Army War Coll, Monograph. 2010. Stewart, Richard W. American Military History vol. I; The United States Army and The Forging A Nation 1775-1791.
- US Army War Coll. Monograph. 2001. Owens, Mackubin Thomas. "What Military Officers Need To Know About Civil-Military Relations (CMR)". Naval War Coll Review. Volume 65 No.2. 2012. Paper. "The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Questions of Professionalisme Militer Amerika 21 Civilian Control". Porter, Jack J. "The Construction of Liberal Democracy: The Role Of Civil-Military Institutions In State and Nation-Building In West Germany and South Africa". Strategic Studies Institute.
- Valenzuela, J. Samuel.1992. "Democratic Consolidation in Post-Transitional Setting: Notion, Process and Facilitating Conditions" dalam Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective. Scott Mainwaring, Guillermo O'Donnell dan J. Samuel Valenzuela (Eds.). Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
- Wenger, Martha. 1989. Turkey in the Age of Glanost, Middle East Research and Information Project Journal.
- Widjajanto, Andi. 2010. "Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, 1945- 1998." Jurnal Prisma 29 (No.1): 3-20. 230 JURNAL POLITIK, VOL. 2, NO. 2, FEBRUARI 2017
- Widjajanto, Andi. 2013. "Indonesia's Military Doctrinal Stagnation." Strategic Review. 1 May
<http://www.sr-indonesia.com/web-exclusives/view/indonesia-s-military-doctrinal-stagnation>. (5 Februari 2017). Yin. Robert K. 2014. Case Study Research Design and Methods 5th Edition. Thousand Oaks: Sage
- Wiranatakusumah, Kisenda, 2000. "Civil-Military Relations In The Late Soeharto-Era"
- Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations (8th ed.). Pearson Education.
- Yukl, G. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.
- Yulianto, A. (2002). Hubungan Sipil-Militer di Indonesia pasca Orba. Jakarta: Raja Grafindo Persada

PROFIL PENULIS

Dr. Herlina Juni Risma Saragih, M.Si., CIQnR., CIQaR.



Penulis lahir di Medan Sumatera Utara, pada tanggal 28 Juni 1965. Meraih gelar Master pada tahun 1997, dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 2011. Saat ini menjabat Wakil Dekan I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia Kementerian Pertahanan. Aktif dalam beberapa organisasi dan beberapa penghargaan yang pernah diperoleh diantaranya: Mahasiswa Teladan Nasional 1987, Dosen Teladan Tahun 2015, Penghargaan Dosen Terbaik Universitas Pertahanan Tahun 2018, Penghargaan/Tanda Jasa berupa Satyalancana Karya Sastra XX dari Presiden RI tahun 2017, dan *Humanitarian Excellence Award 2022*. Aktif sebagai pembicara di berbagai kegiatan seminar, juga rutin mengikuti kegiatan ilmiah baik didalam maupun di luar negeri, baik berupa kegiatan konferensi maupun penelitian. Kegiatan konferensi internasional yang pernah diikuti diantaranya menjadi presenter pada acara *“The 14th ADRI 2017 International Conference and Call for Papers”*. *“The 2018 Annual Conference of Asian Association for Public Administration (AAPA)”* dan *“47th International Scientific Conference Economic and Social Development 2019”*. Dalam menjalankan Tri Dharma sebagai dosen, editor sampai saat ini telah menerbitkan lebih dari 10 judul buku ber-ISBN sebagai penulis pertama maupun kolaborasi. Menerbitkan lebih dari 49 artikel-artikel pada jurnal internasional dan nasional yang terindeks Scopus, Copernicus, dan jurnal nasional Sinta.

MANAJEMEN SDM DALAM HUBUNGAN SIPIL MILITER UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Hubungan sipil-militer bukanlah hanya tentang siapa yang memegang kendali, tetapi juga tentang bagaimana sinergi antara kedua belah pihak dapat membangun kekuatan pertahanan nasional yang efektif. Buku ini menggali esensi dari manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam dinamika hubungan sipil-militer, menyoroti peran krusialnya dalam memperkuat profesionalisme, kompetensi, dan integritas personel militer untuk tujuan pertahanan negara yang kuat.

Pentingnya manajemen SDM dalam konteks ini tercermin dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesiapan personel militer. Pelatihan, pengembangan karier, dan evaluasi kinerja menjadi landasan utama untuk membangun prajurit yang handal dan berkualitas. Buku ini menguraikan tantangan dan solusi dalam aspek pendidikan, rekrutmen, kesejahteraan, dan pengembangan kepemimpinan, dengan penekanan pada kurikulum yang relevan, seleksi ketat, perhatian terhadap kesejahteraan personel, dan pembinaan kepemimpinan yang kuat.

Manajemen SDM yang efektif juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional melalui dialog konstruktif antara komponen sipil dan militer. Kolaborasi dan program pengembangan bersama menjadi instrumen yang vital dalam membangun sinergi yang harmonis untuk tujuan pertahanan negara yang kokoh. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusi juga menjadi pilar dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam manajemen SDM militer.

Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya moral dan nilai-nilai etika dalam membentuk karakter dan tindakan bertanggung jawab personel militer. Nilai-nilai ini tidak hanya membimbing tindakan dalam ranah militer, tetapi juga membangun kepercayaan publik, mendukung profesionalisme, dan memperkuat kohesi antara TNI dan masyarakat. Dengan memperhatikan pembelajaran dari pengalaman internasional, buku ini menawarkan wawasan yang berharga untuk mengembangkan strategi pertahanan yang lebih adaptif dan inklusif, serta memperkuat kesatuan nasional dan kesetaraan gender dalam konteks militer Indonesia. "Manajemen SDM dalam Hubungan Sipil Militer untuk Pertahanan Negara" mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas dan pentingnya manajemen SDM dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertahanan nasional yang tangguh dan adaptif. Dengan pendekatan holistik dan fokus pada integrasi antara aspek sipil dan militer, buku ini menjadi panduan yang berharga bagi para praktisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam mengelola sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara yang optimal.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-297-2



9 786235 002972